

Model Rekonsiliasi Kultural untuk Mengatasi Konflik Sosial antar Perguruan Silat di Madiun

Abraham Nurcahyo
Soebijantoro

Yudi Hartono

IKIP PGRI Madiun, Jl. Setia Budi No 85 Madiun
email: jurnalagastya@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial antar perguruan silat di Madiun. Konflik tidak berkesudahan hingga saat ini. Tindakan pengamanan untuk menghentikan kekerasan penting dilakukan oleh aparat, namun demikian suasana psikologis di lapis bawah belum banyak berubah. Upaya-upaya pemberdayaan untuk rekonsiliasi dengan pendekatan kultural perlu segera disiapkan dan pendekatan keamanan mulai dikurangi. Pendekatan budaya terlebih dahulu dilakukan dengan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan. Model rekonsiliasi kultural ini diharapkan dapat lebih memberi harapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan. Model rekonsiliasi kultural diujicobakan dalam skala kecil untuk satu wilayah di Madiun dan dalam skala besar untuk 6 wilayah yang diambil dengan teknik random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model rekonsiliasi kultural dilakukan melalui forum akademis karena lebih kepada nilai-nilai keberadaban yang senantiasa ditumbuhkembangkan, dengan demikian melalui forum ini akan tumbuh dan berkembang kesadaran aktivitas persilatan yang lebih beradab. Forum akademis yang dipergunakan dalam rangkaian model pendekatan sosial budaya dengan menghadirkan stakeholder dari berbagai kalangan. Dari kegiatan tersebut terungkap bahwa masyarakat sesungguhnya sudah jemu dengan konflik yang tidak kunjung selesai bahkan berpotensi melebar pada pokok persoalan lain seperti urusan politik. Berbagai pihak menyadari bahwa silat sebagai produk budaya bangsa hendaknya disadari perlunya ditumbuhkembangkan sebagai produk yang lebih humanis. Gerak silat sebagai aset kebanggaan bangsa yang tidak seharusnya direndahkan martabatnya dengan munculnya konflik yang menimbulkan ketidaknyaman dalam kehidupan masyarakat, bahkan telah mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

Kata kunci: model rekonsiliasi kultural, konflik sosial, perguruan silat

Abstract: *This study aims to develop a model of cultural reconciliation to resolve social conflicts between college silat in Madiun . The Interminable conflict is until today. Security action to stop the violence need to be perpetrated by the apparatus, yet the psychological atmosphere in the lower layer has not changed much. Empowerment efforts for reconciliation through cultural approach need to be prepared and security approach began to be reduced. The cultural approach need to be taken firstly. It is taken by consciousness transformation through the efforts of forgiveness of the past to renew the relationship. Model of cultural reconciliation is expected to be more promising. The method used in this research is a method of research and development. Model of cultural reconciliation tested on a small scale for the region in Madiun and a large scale for six territories taken by random technique. The results showed that the implementation model of cultural reconciliation conducted through academic forum because it was more concern on the values of civility which are constantly cultivated. Thus through this forum will grow and thrive awareness silat activities to be more civilized. Academic forums used in series model of socio-cultural approach by presenting stakeholders from various circles. These activities revealed that the public is already bored with unresolved conflicts even potentially wide in other subject matter such as political affairs. Various parties recognized that silat as cultural products should be realized the need to be cultivated as a more humane products. Silat motion as the pride of the nation's assets that should not be demeaned its dignity with conflict which cause discomfort in people's lives even makes loss of life and property.*

Keywords: *model of cultural reconciliation, social conflict, college silat*

Konflik sosial di Madiun yaitu antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda melibatkan faktor-faktor historis yang berdampak pada situasi sosiologis. Faktor

historis berakar dari perbedaan pendapat guru murid generasi awal dalam pengembangan Perguruan Setia Hati. Saat itu konflik masih pada fase latensi dimana perbedaan masih dapat diterima. Konflik bereskalasi

pasca Peristiwa G30S ketika terjadi bentrok antar pendekar SH Terate dengan SH Winongo, meskipun keduanya bukanlah partisan dalam peristiwa tersebut. Hubungan mulai memburuk dan stereotip negatif mulai berkembang. Konflik semakin meluas sejak tahun 1990-an ketika jumlah anggota baru keduanya semakin meningkat. Pelanggaran etika perguruan mulai merebak karena kurang adanya sanksi organisatoris yang tegas. Kekerasan mudah meletus dan melibatkan massa pendukung yang banyak. Konflik memasuki fase terjebak. Berbagai momentum yang sesungguhnya memiliki spirit yang sama seperti Suran Agung, Halal bihalal, dan pengesahan anggota baru justru menjadi arena konflik.

Konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Konflik merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dapat mendorong perubahan, namun akan menjadi destruktif apabila mengarah pada kekerasan. Tidak ada cara tunggal untuk menyelesaikan konflik. Konflik selalu khas tergantung permasalahan yang dipersengketakan, pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang muncul, kepentingan dan kebutuhan yang hendak dicapai, dan opsi penyelesaiannya, nilai-nilai yang dianut, sistem sosial dan sistem hukum yang diterapkan, dan konteks lainnya.

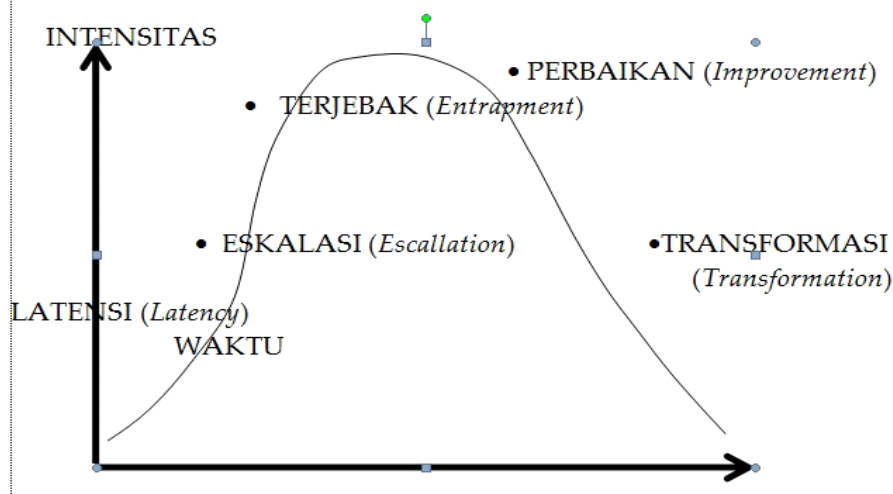
Konflik adalah istilah netral. Baik buruknya tergantung konteks dan pengelolaan. Ia bisa buruk dan bisa pula baik. Jika konflik tidak dikelola dan berubah menjadi kekerasan, maka konflik menjadi buruk. Dan jika konflik dapat dikelola untuk mendorong kemajuan, maka konflik menjadi baik. Konflik merupakan dinamika wajar dalam hidup masyarakat. Masyarakat damai bukanlah masyarakat yang hidup tanpa konflik, melainkan masyarakat yang konfliknya dapat dikelola sehingga menjadi kekuatan transformatif dalam masyarakat. Kualitas manusia dalam relasi antar sesamanya tidak diukur dari kemampuannya untuk menghindari konflik, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan berprinsip keadilan (Dian Nafi', 2005:1).

Tidak ada cara tunggal untuk menyelesaikan konflik. Konflik selalu khas tergantung permasalahan yang dipersengketakan, pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang muncul, kepentingan dan kebutuhan yang hendak dicapai, dan opsi penyelesaiannya. Kekhasan itu juga dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai yang dianut, sistem sosial dan sistem hukum yang diterapkan, dan konteks lainnya. Oleh karena itu cara yang efektif di suatu masyarakat belum tentu efektif jika diterapkan pada masyarakat lainnya.

Konflik berbeda dari kekerasan. Suatu ketegangan dan persengketaan disebut sebagai konflik jika masing-masing pihak masih bergerak di wilayah haknya. Jika telah terjadi pelanggaran wilayah hak, maka konflik telah berubah menjadi kekerasan.

Konflik berkembang dari fase latensi, eskalasi, terjebak, perbaikan, dan transformasi. Pada fase latensi perbedaan yang ada dapat diterima. Pada fase eskalasi komunikasi terhambat, kelompok-kelompok mengeras, dan sumber-sumber dikerahkan. Pada fase terjebak komunikasi putus, kekerasan meletus, terjadi segregasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terhambat dan krisis terjadi. Pada fase perbaikan kejenuhan terhadap kekerasan dan kerinduan akan masa damai. Dan pada fase transformasi perdamaian dinilai memberikan penyelesaian masalah yang tidak cukup memuaskan.

Tindakan rekonsiliatif tergantung fase konfliknya. Jika fase konfliknya masih laten, maka perlu dilakukan *peace building* dengan kegiatan-kegiatan pencegahan konflik. Di dalamnya setiap usaha menciptakan keadilan sosial menjadi sangat penting. Saat konflik memanas (bereskalasi), maka pencegahan konflik harus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan lintas komunitas. Jika konflik sudah mencapai puncaknya, terjebak atau *entrapment*, maka program humanitarian bisa dipergunakan untuk mengawali upaya-upaya rekonsiliasi seiring dengan tindakan keamanan untuk penghentian kekerasan.



Gambar 1: Intensitas Konflik

Sumber: Diadaptasi dari Craig Arendse, Robert Evans dan John C Nelson, *Advanced Training for Mediation*, PSPP UKDW, Yogyakarta, 2000.

Dalam konteks konflik sosial yang terjadi antar perguruan silat di Madiun diperlukan upaya pengelolaan dan cara-cara penanganan yang relevan dengan karakteristik konfliknya sehingga dapat mencegah pihak-pihak berkonflik dari kekerasan. Disinilah urgensi penelitian ini untuk mengembangkan model rekonsiliasi yang dapat diterapkan secara efektif untuk menangani konflik antar perguruan silat di Madiun.

METODE

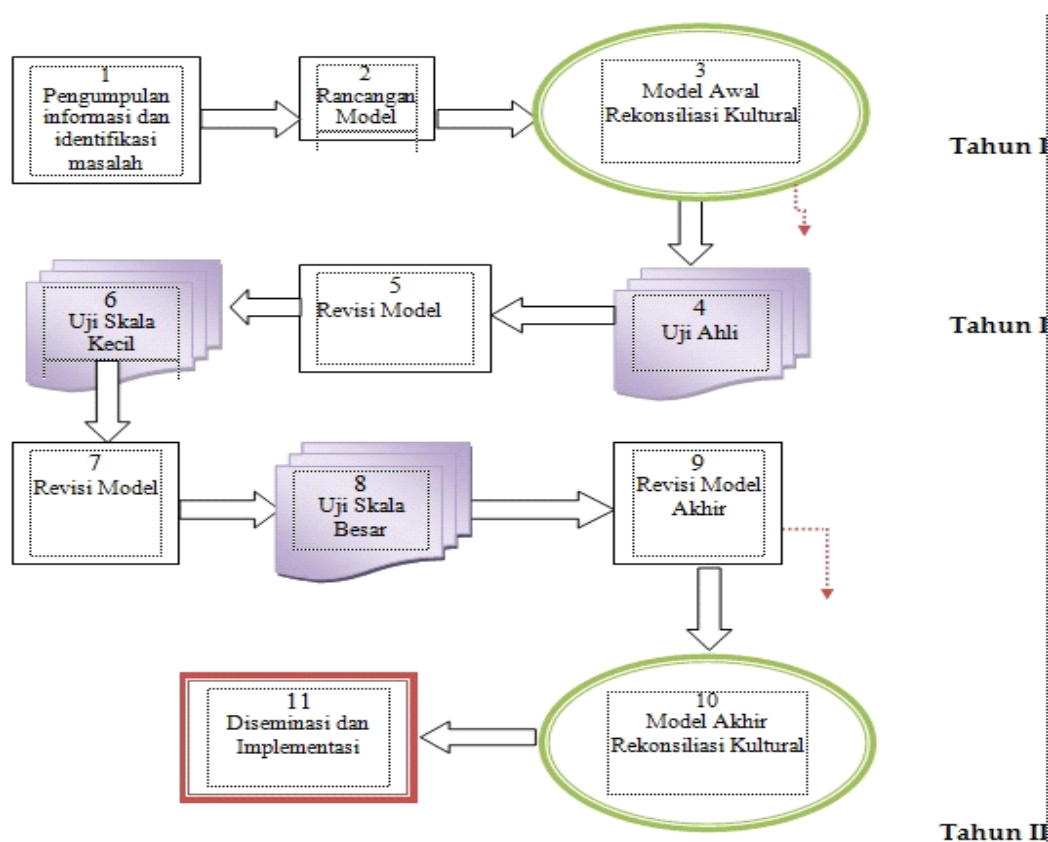
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Prosedur atau langkah penelitian dan pengembangan merujuk pada siklus R & D dari Borg dan Gall (1983: 626) yang meliputi kegiatan: pengumpulan informasi dan identifikasi masalah, perencanaan model, pengembangan model awal, uji terbatas, revisi model, uji skala kecil, revisi model, uji skala besar, revisi model, model akhir, diseminasi dan implementasi.

Penelitian dilakukan selama dua tahun. Sebagai langkah awal pada tahun pertama, dilakukan pengumpulan informasi dan identifikasi masalah terkait dengan model rekonsiliasi kultural yang dapat dikembangkan untuk mengatasi konflik sosial di Kota Madiun. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin perguruan silat, organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, birokrat, aparat keamanan, serta dari kalangan media massa.

Hasil identifikasi masalah tersebut selanjutnya dikembangkan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para pakar rekonsiliasi untuk menggali pengembangan model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial. Hasil kegiatan tersebut adalah model awal pengembangan model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial di Kota Madiun.

Model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk buku panduan yang berisi paparan model rekonsiliasi kultural dan karakteristik konflik sosial serta langkah-langkah strategis pengembangan model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial di Madiun sebagai hasil penelitian tahun pertama.

Buku panduan tersebut diujicobakan untuk melihat efektivitasnya untuk mengatasi konflik sosial di Kota Madiun. Buku panduan diujicobakan dalam skala kecil kepada masyarakat Madiun di 3 wilayah yang diambil secara random. Subjek uji coba adalah para pimpinan organisasi sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi aparat keamanan, serta dari kalangan media massa. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil uji coba disampaikan kepada para ahli rekonsiliasi untuk memberikan saran perbaikan melalui FGD.



bagian 1 : Bagan alir penelitian

Buku panduan diujicobakan dalam skala kecil kemudian diujicobakan dalam skala besar kepada masyarakat Madiun di 6 wilayah yang diambil dengan teknik random. Subjek uji coba adalah para pimpinan organisasi sosial, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, serta dari kalangan media massa. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil uji coba disampaikan kepada para ahli rekonsiliasi untuk memberikan saran perbaikan melalui forum FGD.

Saran dan data yang masuk dari lapangan operasional digunakan untuk melakukan revisi terhadap produk akhir. Di akhir siklus ini produk buku panduan didesiminasikan dan siap diimplementasikan. Diseminasi dilakukan melalui penulisan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan penerbitan buku panduan model rekonsiliasi kultural untuk mengatasi konflik sosial di Madiun untuk disebarluaskan kepada pengguna sebagai hasil penelitian tahun kedua. Tahapan penelitian selengkapnya dapat dilihat pada bagan 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Konflik

Ditinjau dari fasenya, konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun dapat dirunut sejak Ki Hadjar Hardjo Oetomo berbeda pandangan dengan gurunya Ki Ngabehi dalam pengembangan perguruan. Ki Hadjar memiliki gagasan untuk menyebarkan secara lebih luas ilmu Setia Hati dan menjadi alat perjuangan melawan penjajahan. Gagasan tersebut tidak sejalan dengan doktrin perguruan yang dipegang teguh oleh Ki Ngabehi bahwa penyebaran ilmu Setia Hati tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan di sembarang tempat.

Perbedaan pandangan guru-murid tersebut menimbulkan konflik tersembunyi. Ki Ngabehi sendiri tidak melarang dan tidak pula menyetujui. Ki Hadjar mendirikan perguruan sendiri yang kemudian menjadi Perguruan Setia Hati Terate. Ki Ngabehi menghormati pandangan dan langkah Ki Hadjar tersebut dan Ki Ngabehi pun menghormati pandangan gurunya. Demikian pula ketika R. Djimat Hendro Soewarno mendirikan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Pihak Setia Hati Panti juga membiarkannya. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi dimana perbedaan yang ada dapat diterima. Perbedaan pandangan guru-murid tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran.

Konflik mengalami eskalasi pasca Peristiwa G30S. Bentrok antara para pendekar dari dua perguruan, yaitu Perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo mengakibatkan hubungan keduanya mulai memburuk. Mereka mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Komunikasi kedua perguruan terhambat oleh muatan-muatan emosi dan sentimen kelompok. Perbedaan-perbedaan semakin ditonjolkan meskipun keduanya berawal dari satu perguruan.

Konflik semakin meningkat dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990-an ketika jumlah anggota baru kedua perguruan semakin banyak dari kalangan remaja usia 17 tahun. Pelanggaran-pelanggaran terhadap etika perguruan mulai merebak. Kekerasan mudah meletus dan melibatkan massa pendukung kedua perguruan. Mereka terjebak dalam konflik yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Konflik memasuki fase terjebak (*entrapment*).

Fase terjebak memerlukan tindakan-tindakan pengamanan oleh aparat untuk menghentikan kekerasan. Petugas keamanan dituntut netral dan memahami faktor-faktor psikologis konflik, terutama psikologi partisan konflik dari kalangan remaja dan psikologi sosial masyarakat Madiun. Program pemberdayaan untuk rekonsiliasi perlu segera disiapkan dan pendekatan keamanan mulai dikurangi di zona-zona aman.

Sasaran pemberdayaan untuk rekonsiliasi harus mencakup partisan tingkat elite dan menengah kedua perguruan, pihak netral seperti Setia Hati Panti dan aparat keamanan, serta pihak yang paling rawan, terutama dari kalangan anggota perguruan usia remaja. Kalangan ini perlu diperhatikan lebih serius untuk ditarik ke posisi netral ataupun mencegah mereka terlibat menjadi partisan konflik. Mereka yang telah berada di posisi netral dikembangkan menjadi kelompok inti rekonsiliasi untuk memperluas zona damai. Berbagai upaya media si perlu dilakukan melalui diplomasi ulang alik, menyelenggarakan pertemuan besar yang dihadiri oleh partisan, *stakeholder* partisan, dan pihak netral ataupun diselenggarakan oleh pihak ketiga yang cakap dan memahami permasalahan konflik untuk bersama-sama mencari dan menemukan cara damai penyelesaian konflik.

Karakteristik konflik menentukan cara-cara penyelesaiannya. Konflik antar perguruan silat di Madiun memiliki akar sejarah panjang yang menyangkut klaim kebenaran historis masing-masing perguruan. Kedua perguruan sama-sama mengklaim sebagai penerus ilmu Setia Hati Ki Ngabehi. Namun demikian, keduanya terpisah baik secara keilmuan maupun organisasi. Di tingkat elit kedua perguruan hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi di tingkat bawah menjadi masalah krusial terkait dengan simbol-simbol dan tradisi di masing-masing perguruan. Suran Agung, Ha-lal bihalal, dan Pengesahan yang menjadi tradisi dan memiliki spirit yang sama sering menjadi arena konflik sosial yang terjadi secara massal.

Faktor historis tersebut mempengaruhi pembentukan identitas sosial kedua perguruan sebagai penerus ilmu Setia Hati. Meskipun berakar pada satu perguruan, namun masing-masing mengembangkan identitas sosial dengan simbol-simbol dan etika perguruan tersendiri. Simbol-simbol digunakan untuk memperkuat identitas dalam berbagai bentuknya (tugu, kostum, baliho). Masyarakat Madiun seolah terpolarisasi ke dalam dua kekuatan kelompok perguruan silat tersebut.

Faktor historis juga menimbulkan berkembang-

nya stereotip negatif di kedua perguruan. Ingatan-ingatan kolektif di masa lalu diproduksi terus menjadi hubungan baik serta terciptanya etos berdamai sehingga terbuka kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Kedua perguruan harus mau dan rela menyadari apa yang telah terjadi pada masa lalu. Transformasi kesadaran tersebut penting untuk membangun hubungan baru yang lebih baik. Selanjutnya masing-masing perguruan harus bersedia merubah sudut pandangnya mengenai posisi dan identitas kelompok sendiri, posisi dan identitas kelompok lain seperti direkomendasikan Long & Brecke (2003: 30). Dengan cara begitu, upaya-upaya rekonsiliasi akan menemukan jalannya.

Upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan dengan pendekatan keamanan akhir-akhir ini relatif berhasil mengendalikan dan mengurangi kekerasan. Pengurangan 5000 personil aparat keamanan mampu menjamin keamanan dari konflik kekerasan massal. Namun demikian, suasana psikologis di tingkat bawah belum banyak berubah karena pendekatan keamanan hanya diberlakukan dalam momentum-momentum tertentu dan tidak berkelanjutan.

Rekonsiliasi Kultural

Rekonsiliasi dengan pendekatan kebudayaan dapat menjadi pilihan yang lebih potensial. Keterlibatan pendekar dari berbagai perguruan dalam MTQ yang diselenggarakan Pemerintah Kota Madiun beberapa waktu lalu menjadi media rekonsiliasi. Para pendekar dapat memfungsikan kependekarannya sebagai sosok yang menenteramkan bukan menakutkan. Upaya Pemerintah Kota Madiun menjadikan ikon silat sebagai aset wisata yang dikemas dalam bentuk festival juga potensial menjadi salah satu cara rekonsiliasi kultural.

Model rekonsiliasi kultural yakni model rekonsiliasi dengan pendekatan kultural atau pendekatan budaya dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan.

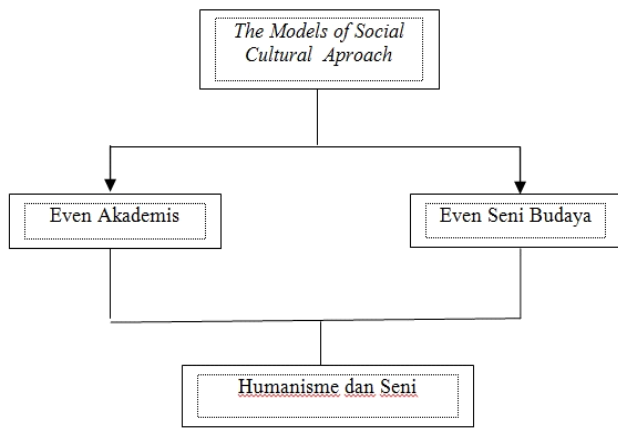
Berangkat dari even atau momen tersebut diatas maka peneliti berpendapat bahwa diperlukan sebuah model transformasi konflik dan pemberdayaan rekonsiliasi. Adapun model tersebut adalah dengan menggunakan *Social cultural approach* atau pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini sebagai sebuah alternatif pemecahan permasalahan mengingat selama ini yang diberlakukan adalah model mekanisme rekonsiliasi struktural.

Model pendekatan budaya lebih menekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi budaya dengan melibatkan kedua belah yang berkonflik. Oleh karena yang berperan adalah aparat pemerintah dan penegak hukum, maka implementasi model akan ditekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi edukasi baik melalui forum akademis maupun seni budaya. Hal ini dilakukan dengan berangkat dari pemahaman masyarakat bahwa silat yang identik dengan aktifitas beladiri yang cenderung dekat deng-

an kekerasan. Model ini mencoba meminimalisir aspek kekerasan yang tidak harus selalu ditampilkan dalam setiap kegiatannya.

Keinginan berbagai pihak agar slogan Madiun sebagai kota silat perlu diapresiasi dengan menjauhkan kesan silat sebagai suatu aktifitas yang menakutkan. Model pendekatan sosial budaya yang berorientasi akademis dapat dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkonflik untuk ikut serta membelajarkan nilai nilai kependekarannya kepada masyarakat melalui forum akademis seperti sarasehan maupun seminar dengan tema tema kepemudaan dan ketahanan nasional sebagai jati diri bangsa. Implementasinya dapat melibatkan para pelajar, mahasiswa, pendidik maupun akademisi dan pengambil kebijakan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui even even penting seperti peringatan hari kemerdekaan, sumpah pemuda maupun hari pahlawan. Harapan yang muncul adalah tumbuhnya kesadaran dikalangan pelaku persilatan akan perlunya tanggung jawab moral keteladanan sebagai sebuah pola perilaku positif yang harus tumbuh dimasyarakat. Forum akademis dipilih sebagai sebuah pendekatan karena lebih kepada nilai nilai keberadaban yang senantiasa ditumbuh kembangkan, dengan demikian melalui forum ini akan tumbuh dan berkembang kesadaran aktivitas persilatan yang lebih beradab.

Selain melalui forum akademis, model pendekatan sosial budaya dapat dilakukan dengan melibatkan mereka yang berkonflik pada kegiatan seni budaya. Kegiatan seni budaya yang dimaksudkan adalah aktivitas yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang memberikan hiburan sekaligus pembelajaran positif akan nilai nilai kependekarannya kepada masyarakat Madiun. Implementasinya dilakukan melalui event regional maupun nasional seperti hari jadi kota Madiun, peringatan kemerdekaan Indonesia, sumpah pemuda, kebangkitan nasional serta hari pahlawan. Wujud seni budaya yang dipertunjukkan harus dilakukan dihadapan masyarakat dengan setting kedua belah pihak yang berkonflik selalu berada dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini untuk menunjukkan kesan bahwa diantara mereka sudah tidak lagi konflik. Seni budaya yang ditampilkan dapat berwujud statis dan non statis. Wujud statis dilakukan melalui media parade atau karnaval dengan menampilkan paduan gerak jurus kedua perguruan silat tanpa harus menunjukkan kesan saling bersaing pada forum akademis. Sedangkan wujud non statis adalah menunjukkan seni pertunjukan silat sebagai sebuah hiburan dikalangan pelajar mahasiswa yang dapat dilakukan di sekolah maupun kampus dengan disertai narasi dalam konten silat sebagai aset budaya bangsa dan jati diri bangsa yang harus dilestarikan serta ditumbuhkembangkan. Adapun bagan model rekonsiliasi konflik antar perguruan silat seperti pada bagan 2.



Bagan 2: Model Rekonsiliasi Kultural

Berangkat dari even atau momen yang sangat rawan munculnya konflik maka diperlukan sebuah model transformasi konflik dan pemberdayaan rekonsiliasi. Adapun model tersebut adalah dengan menggunakan *social cultural approach* atau pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini sebagai sebuah alternatif pemecahan permasalahan mengingat selama ini yang diberlakukan adalah model mekanisme rekonsiliasi struktural.

Model pendekatan budaya lebih menekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi budaya dengan melibatkan kedua belah yang berkonflik. Oleh karena yang berperan adalah aparat pemerintah dan penegak hukum, maka implementasi model akan ditekan kepada aktifitas sosial yang berorientasi edukasi baik melalui forum akademis maupun seni budaya. Hal ini dilakukan dengan berangkat dari pemahaman masyarakat bahwa silat yang identik dengan aktifitas beladiri yang cenderung dekat dengan kekerasan. Model ini mencoba meminimalisir aspek kekerasan yang tidak harus selalu ditampilkan dalam setiap kegiatannya.

Keinginan berbagai pihak agar slogan Madiun sebagai kota silat perlu diapresiasi dengan menjauhkan kesan silat sebagai suatu aktifitas yang menakutkan. Model pendekatan sosial budaya yang berorientasi akademis dapat dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkonflik untuk ikut serta membelajarkan nilai-nilai kependekaran kepada masyarakat melalui forum akademis seperti sarasehan maupun seminar dengan tema-tema kepemudaan dan ketahanan nasional sebagai jati diri bangsa. Implementasinya dapat melibatkan para pelajar, mahasiswa, pendidik maupun akademisi dan pengambil kebijakan.

Pendekatan sosial budaya dipilih dengan satu alasan bahwa pendekatan yang dipergunakan selama ini masih bersifat *top down* melalui mekanisme formal struktural. Pendekatan ini hanya menyentuh pada mekanisme pimpinan masing-masing perguruan silat dan tidak menyentuh pada multi aspek di level paling bawah. Pendekatan *down up* sudah dilakukan oleh pihak Polri dengan asumsi bahwa perlu langkah memotong komunikasi anggota silat dengan pimpinan mereka. Namun hal ini masih belum optimal, mengi-

ngat ikatan struktural keanggotaan bersifat tradisional.

Implementasi model transformasi konflik dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dapat dilakukan melalui even penting seperti peringatan hari kemerdekaan, sumpah pemuda maupun hari pahlawan. Harapan yang muncul adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan pelaku persilatan akan perlunya tanggung jawab moral keteladanan sebagai sebuah pola perilaku positif yang harus tumbuh di masyarakat. Forum akademis dipilih sebagai sebuah pendekatan karena lebih kepada nilai-nilai keberadaban yang senantiasa ditumbuhkembangkan, dengan demikian melalui forum ini akan tumbuh dan berkembang kesadaran aktivitas persilatan yang lebih beradab.

Forum akademis yang dipergunakan dalam rangkaian model pendekatan sosial budaya dilaksanakan oleh program studi pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN dengan mengambil momen hari kebangkitan Nasional. Wujud pendekatan sosial budaya melalui forum akademik dipertunjukkan dihadapan masyarakat kampus dengan setting kedua belah pihak yang berkonflik selalu berada dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini untuk menunjukkan kesan bahwa diantara mereka sudah tidak lagi konflik.

Berangkat dari panduan model, maka pelaksanaan forum akademik diwujudkan dalam bentuk sarasehan yang mengundang stakeholder dari berbagai kalangan seperti guru, mahasiswa calon guru, dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, masyarakat umum, dan dari kedua perguruan silat. Dari forum tersebut terungkap bahwa masyarakat sesungguhnya sudah jemu dengan konflik yang tidak kunjung selesai bahkan berpotensi melebar pada pokok persoalan lain seperti urusan politik. Oleh moderator akhirnya ditemukan titik terang dari tujuan sarasehan yaitu berbagai pihak akhirnya menyadari bahwa silat sebagai produk budaya bangsa hendaknya disadari perlunya ditumbuhkembangkan sebagai produk yang lebih berkehumanisan atau humanistik. Melalui sarasehan tersebut dunia pendidikan (IKIP PGRI Madiun) yang bertanggung jawab mencetak tenaga guru yang berkualitas akhirnya memiliki bekal pengetahuan akan nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam olah gerak silat sebagai sebuah aset kebanggaan bangsa yang tidak seharusnya direndahkan martabatnya dengan munculnya konflik yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat, bahkan telah mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

SIMPULAN DAN SARAN

Model rekonsiliasi kultural yakni model rekonsiliasi dengan pendekatan kultural atau pendekatan budaya dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan. Berangkat dari even atau momen tersebut diperlukan sebuah model transformasi konflik dan pemberdayaan rekonsiliasi. Adapun model tersebut adalah dengan menggunakan *social cultural approach* atau pendekatan sosial

budaya. Pendekatan ini sebagai sebuah alternatif pemecahan permasalahan mengingat selama ini yang dilakukan adalah model mekanisme rekonsiliasi struktural.

Model pendekatan budaya lebih menekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi budaya dengan melibatkan kedua belah yang berkonflik. Implementasi model ditekankan pada aktivitas sosial yang berorientasi edukasi baik melalui forum akademis maupun seni budaya. Hal ini dilakukan dengan berangkat dari pemahaman masyarakat bahwa silat yang identik dengan aktifitas bela diri yang cenderung dekat dengan kekerasan. Model ini mencoba meminimalisir aspek kekerasan yang tidak harus selalu ditampilkan dalam setiap kegiatannya dan menampilkan sisi seni dan humanismenya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ali, A. 2004. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM.
- Blau, P. 1964. *Exchange and Power in Social Life*, Wiley.
- Chang, W. 2001. Kesejahteraan Rakyat di Tengah Konflik. *Kompas*, 27 Januari 2001.
- Craig, A., Robert, E. & John C. N. 2000. *Advanced Training for Mediation*. PSPP UKDW, Yogyakarta.
- Fanani, A. F. 2003. Fajar Baru Kehidupan Bangsa. *Kompas*, 3 Maret 2003.
- Fisher, S. et.al., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: British Council.
- Haryatmoko. 2001. Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk. *Kompas*, 11 Juli 2001.
- Mamar, S. 2003. *Konflik dan Kekerasan*, Makalah Disajikan Pada Temu Budaya Sulawesi Tengah di Palu.
- Parsons, T. 1951. *The Social System*, Free Press.
- Pusat Pemberdayaan Rekonsiliasi dan Perdamaian Universitas Krida-waca-na (PPRP Ukrida) Jakarta. 2001. *Case Writing Training for Conflict Transformation*, Bogor.
- Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian UKDW Yogyakarta. 1998. *Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi*. Yogyakarta: PSPP UKDW.
- Soewarno, DH. *Pusaka Pencak Silat Tiga Zaman Persaudaraan Setia-Hati Winongo Tunas Muda*. tidak diterbitkan.
- Singgih, J. dkk. *Buku Peringatan Persaudaraan Setia-Hati 1903-1963*, tidak diterbitkan.
- Suparto, T. 2006. Negara dalam Spiral Kekerasan", *Kompas*, 16 Februari 2006